

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan karakteristik geologis dan geografis wilayah, Indonesia merupakan kawasan rawan akan bencana banjir. Berkisar 30% dari 500 sungai yang ada di Indonesia melintasi wilayah yang memiliki penduduk sangat padat. Lebih dari 220 juta penduduk, sebagian dari mereka miskin dan tinggal di daerah rawan akan bencana banjir. Biasanya bencana banjir tersebut terjadi di wilayah Indonesia bagian Barat karena menerima curahan hujan yang lebih tinggi dibandingkan dengan di bagian Timur. Di Indonesia banjir adalah ancaman musiman yang terjadi apabila meluapnya tubuh air dari saluran yang ada dan menggenangi wilayah sekitarnya. Banjir merupakan wilayah ancaman alam yang paling sering terjadi dan paling banyak merugikan dari segi kemanusiaan maupun ekonomi.¹

Nusa Tenggara Barat memiliki tingkat kerentanan terhadap potensi bencana akibat faktor hidrometeorologi yang cukup tinggi. Samudera Hindia dan Laut Flores yang mengapit wilayah ini turut mempengaruhi cuaca dan iklim di NTB. Kondisi topografi NTB yang berbukit - bukit sekaligus dekat dengan laut menjadikan faktor lokal memiliki kontribusi yang besar dalam pembentukan

¹ Rismawati, et.al.2015. “Peran Pemerintah Dalam Penanggulangan Banjir di Kecamatan Manggala Kota Makassar” dalam Jurnal Administrasi Publik. Vol.1 No. 2/2015, Hlm.169.

cuaca. Hujan dengan intensitas lebat, durasi hujan yang cukup lama serta distribusi curah hujan yang tidak merata berpotensi menyebabkan banjir dan longsor di suatu tempat. Setiap kali memasuki musim hujan, NTB harus segera siaga dalam menghadapi bencana akibat faktor meteorology.²

Berdasarkan informasi Awal Pusat Krisis Kesehatan terjadi banjir yang melanda Wilayah Lombok Barat yaitu di kecamatan Lembar pada tanggal 31 Januari 2018. Hujan deras dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Lombok Barat mengakibatkan puluhan rumah warga terendam yang berada di desa Labuhan Terang, Kec. Lembar pada hari Selasa. Menurut pemerintah setempat banjir disebabkan oleh tanggul yang berada di atas bukit Desa Labuan Tereng jebol akibat tidak kuat menahan volume air hujan. Tak lama setelah banjir sedikit mereda sekitar pukul 01.00-01.30 banjir susulan pun menerjang. Untungnya warga masih berada di tempat pengungsian, bahkan hingga pagi hari banjir susulan kembali menerjang hingga ketinggian 1-1,15 meter. Banjir juga mengakibatkan 230 warga desa mengungsi ke masjid. Jumlah rumah dan korban terdampak masih dalam proses pendataan BPBD setempat. Dalam kejadian bencana banjir ini tidak ada korban jiwa. Dari data awal yang diperoleh dari

² Ferry Dwi. “Bencana Banjir Bandang DAS Kokok Sambalia : Kajian Pendahuluan”.(Online) <http://ppdas.geo.ugm.ac.id> diakses tanggal 4 Januari 2018.

Dinas Kesehatan Setempat yang berkoordinasi dengan beberapa dinas terkait, jumlah korban diketahui yaitu sebanyak 279 orang pengungsi.³

Daerah Labuan Tereng adalah salah satu desa di kecamatan Lembar merupakan salah satu daerah rawan bencana dan paling parah terkena banjir, wilayah ini memiliki tanggul air yang berada di atas bukit. Di sepanjang kaki bukit tersebut terletak rumah-rumah penduduk yang sebenarnya terlihat rawan akan bencana banjir. Seperti diketahui pada awal 2017 terjadi banjir hebat di Desa labuhan tereng, bahkan kantor Desa dan Polsek Lembar juga ikut terkena bencana banjir. Penyebabnya karena APBD Perubahan 2017 tidak tertangani, akhirnya banjir kembali lagi pada awal tahun 2018. Menurut masyarakat setempat APBD Perubahan 2017 tidak dianggarkan, akibatnya banjir kembali pada tahun 2018. APBD Perubahan 2018 baru akan dikerjakan pada bulan November dan Desember 2018 sehingga membuat tanggul menjadi tidak maksimal dalam menahan banjir karena pada waktu itu hujan turun lagi pada awal tahun.⁴

Data yang berhasil dihimpun BPBD Lombok Barat menyatakan terdapat empat dusun yang terkena dampak banjir yaitu Dusun Songkang sebanyak 810 jiwa 267 KK, Labuan Tereng 279 jiwa 111 KK, Kebon Talo sebanyak 745 jiwa 254 KK dan Tibu sebanyak 492 jiwa 153 KK. Di samping itu, banjir juga merusak puluhan rumah warga. Selain itu fasilitas umum seperti puskesmas, SD, kantor

³ Pusat Krisis Kesehatan. “*Banjir di Desa Labuan Tereng Lombok Barat*” (Online) <https://www.pusatkrisis.kemkes.go.id/Banjir-di-LOMBOKBARAT-NUSATENGGARABARAT-31-01-2018-13> diakses pada tanggal 27 maret 2018

⁴ Zulkifli. “*Desa Labuan Tereng Anggarkan Rp 450 juta Tangani banjir*” (Online) <https://www.radarlombok.co.id/desa-labuhan-tereng-anggarkan-rp-450-juta-tangani-banjir.html> diakses pada tanggal 27 maret 2018

UPT dan kantor desa. Pemerintah setempat telah berkoordinasi dengan Tim Tagana setempat bersama aparat membantu warga membereskan sisa kotoran dan bangunan akibat banjir. Dinas Sosial juga telah menyiapkan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan warga yang terdampak banjir. Pihaknya juga telah mendrop air minum, air bersih, mie, selimut dan pakaian layak pakai serta kebutuhan bayi.⁵

Mengacu pada undang-undang no 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tanggung jawab pemerintah dalam hal ini yaitu pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan, perlindungan masyarakat dari dampak bencana, penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana, dan pengalokasian anggaran penanggulangan bencana. Sedangkan kewajiban masyarakat tercantum dalam pasal 26 dan 27 terkait dengan “Hak dan Kewajiban Masyarakat”, serta PP no. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana” khususnya pada paragraph 5 pasal 87 poin (1) yaitu, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (1) huruf e bertujuan untuk meningkatkan partisipasi alam rangka membantu penataan daerah rawan bencana ke arah lebih baik dan rasa kepedulian daerah rawan bencana.

⁵Leli, Sri. “Kerugian Akibat banjir Bandang di Lembar diperkirakan Rp 10 miliar” (Online) <https://www.suarantb.com/news/2017/03/30/28196/kerugian.akibat.banjir.bandang.lembar.ditakir.rp.10.miliar> diakses pada tanggal 27 maret 2018

Kesiapsiagaan dalam bencana yang efektif membutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat agar dapat terlaksananya program tanggap bencana. Di Indonesia sebenarnya yang menjadi masalah tidak hanya bencana dan beberapa penyebabnya, melainkan antisipasi bencana itu juga menjadi sebuah masalah tersendiri. Sebagai misal, system peringatan dini memerlukan struktur yang jelas dan sigap, serta sosialisasi yang dapat menyentuh ke seluruh lapisan sosial. Tujuannya yaitu membangun sebuah masyarakat yang selalu waspada saat menghadapi bencana sebagai konsekuensi hidup di daerah rawan akan bencana. Penanganan bencana dari respon terhadap bencana menjadi kesiapsiagaan dalam mengantisipasi bencana menjadi sangat krusial dan penting untuk dilakukan. Pentingnya kesiapsiagaan masyarakat ini sangat berkaitan dengan kondisi lingkungan dan fisik yang memiliki resiko tinggi terhadap bencana alam.

Pemerintah adalah pemangku kepentingan utama yang seharusnya mempunyai peran sangat penting dalam kesiapsiagaan masyarakat untuk mengantisipasi bencana. Kesiapsiagaan pemerintah sangat penting terutama dalam kondisi kepedulian dan kesiapsiagaan masyarakat yang masih sangat terbatas. Pemerintah saat ini masih terkonstrasi pada penanggulangan bencana sedangkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana belum menjadi focus. Melihat masalah seperti ini maka perlu adanya peran pemerintah dalam penanggulangan banjir, sebagaimana yang tercantum pada pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa salah satu tugas dan kewajiban pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan Rakyat Indonesia. Pernyataan tersebut member arti

bahwa pemerintah mempunyai peranan sentral baik secara perencanaan, pengawasan, dan pengendali dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya, dan efektifitas peran pemerintah dapat dilihat dari segi kinerjanya.⁶

Dalam hal ini peran dan tanggung jawab pemerintah dalam peningkatan kualitas kehidupan warga masyarakat harus ditingkatkan. Program-program yang sudah ada pun lebih ditingkatkan agar lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaannya dan terasa manfaatnya bagi masyarakat. Kebutuhan masyarakat terhadap ancaman bencana alam di berbagai daerah bisa jadi berbeda. Tetapi bagaimana membuat masyarakat dapat menyadari dampak yang timbul akibat dari bencana yang serta bagaimana agar masyarakat dapat mengetahui tindakan dan sikap apa yang harus dilakukan dalam menghadapi bencana yang akan datang. Masyarakat harus tahu bagaimana cara bekerjasama dengan pemerintah dalam kesiapsiagaan bencana. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan juga harus ditingkatkan yaitu dengan menjaga keseimbangan alam. Disamping itu kerjasama dari semua stakeholder termasuk kepala desa sangat dibutuhkan supaya segera memberikan informasi agar pemerintah dapat langsung bertindak.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Kolaborasi Peran Pemerintah dan Masyarakat Dalam Kesiapsiagaan Tanggap Bencana Banjir di Lembar, Lombok Barat, NTB”.

⁶ Deny Hidayat, “Kesiapsiagaan Masyarakat: Paradigma Baru Pengelolaan Bencana Alam di Indonesia” dalam Jurnal Kependudukan Indonesia. Vol. III, No. 1/2008. Hal 78-79

Harapan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kolaborasi peran pemerintah dan masyarakat dalam kesiapsiagaan tanggap bencana dan dari hasil penelitian peneliti mengharapkan adanya pengetahuan masyarakat akan dampak yang terjadi akibat dari bencana seperti banjir, sehingga masyarakat sadar dan tahu harus melakukan tindakan seperti apa jika sewaktu-waktu bencana tersebut terulang lagi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka perumusan masalah yang menjadi fokus penelitian adalah “Kolaborasi Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Kesiapsiagaan Tanggap Bencana Banjir di Lembar, Lombok Barat, NTB” Untuk memudahkan dalam pelaksanaan penelitian ini, maka pertanyaan penelitian itu akan diuraikan kedalam sub-sub problematic adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana banjir ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan :

1. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana banjir di Lembar, Lombok Barat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis, yakni sebagai berikut:

1. **Manfaat teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya, menambah intelektual khususnya dalam kesiapsiagaan tanggap bencana sehingga memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang antisipasi apa yang harus dilakukan jika suatu saat terjadi lagi bencana yang serupa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Peneliti mendapatkan manfaat berupa pengalaman untuk melatih kemampuan dalam memahami, mendalami dan mempelajari bagaimana kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat dalam kesiapsiagaan tanggap bencana serta memberi kesempatan kepada peneliti untuk mengaplikasikan teori yang didapat dari perkuliahan di dunia nyata/masyarakat.

b. Pemerintah atau lembaga/organisasi swasta

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah terutama berhubungan dengan cara atau upaya yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat untuk mengetahui, memahami, dan mengurangi dampak buruk yang terjadi akibat dari banjir bandang.

c. Masyarakat

Masyarakat dapat lebih mengetahui dan mengenali dampak-dampak yang timbul akibat dari banjir bandang dan masyarakat dapat bertindak tentang antisipasi apa yang harus dilakukan jika suatu saat terjadi lagi bencana yang serupa.